

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Batanghari

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2022

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi


505052-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601119-
25012023141018

User ID Petugas Pelaporan

pakpahan_tumpal@yahoo.co.id

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-25 14:10:18

 Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.


WIDYUNI S. SORA
DIREKTUR
P.H.A. MANIK, SE., MM
DIREKTUR UTAMA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl Slamet Riyadi No 5A Broni Jambi

Nomor Telepon : 741671232

Penjelasan Umum : Perkembangan Industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan makin kompleksnya kegiatan usaha Bank terkhusus BPR Batanghari yang meningkatkan ekspour risiko Bank. palagi saat ini sudah menggunakan sistem digitalisasi ,Tata Kelola atau Good Corporate Governance (Gcg) pada industri perbankan menjadi penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. dalam rangka meningkatkan kinerja Bank BPR Batanghari ,melindungi kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan,Bank BPR Batanghari konsisten dan wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip prinsip Tata kelola (Gcg). Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Batanghari : 1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata kelola dalam segala operasional Bank sejalan dengan Visi,Misi dan rencana strategis usaha yang ditetapkan Bank. 2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank BPR Batanghari mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank,serta perundangan yang berlaku. 3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank Batanghari kepada stakeholders. 4. Memperbaiki budaya kerja Bank BPR Batanghari. 5. Mengelola sumber daya Bank BPR Batanghari secara lebih Amanah.6 Mendorong dan mendukung pengembangan Bank Batanghari,dengan bisa terciptanya penerapan Tata kelola yang baik pada PT BPR Batanghari maka dapat menjadi brand bahwa BPR Batanghari adalah BPR yang bisa melayani masyarakat dan kebutuhan masyarakat secara baik dan transparan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	P.HASURUNGAN A MANIK SE MM	Direktur Utama	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar,keputusan rups dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2.Bertanggung jawab penuh untuk mengelola Bank sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan sesuai dengan prinsip GCG 3. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional BPR dalam mencapai maksud dan tujuan BPR secara sehat. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS .5. Menindak lanjuti temuan Auidit baik eksteran maupun Interen 6. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap pekerjaan para Petugas Bank. 7.Memantau dan memeriksa neraca keuangan,rugi laba serta menganalisa angka ratio kesehatan Bank dalam kaitannya dengan RBB dan anggaran yang telah ditetapkan. 8. Wajib menjalankan serta melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan ketentuan berlaku.9. Membuat dan mempersentasekan rencana bisnis BPR setiap tahunnya untuk diusulkan kepada Dewan komisaris dan disampaikan ke OJK.10. Bertanggung jawab terhadap perkembangan BPR setiap bulan,semester dan tahunan untuk disampaikan kepada komisaris dan OJK. 11. Membina hubungan kerjasama yang baik antara sesama karyawan dengan sasaran untuk meningkatkan produktivitas kinerja pegawai. 12. Menetapkan wewenang Manager dan Direktur untuk memfiat maksimum biaya untuk menunjang kelancaran operasional Bank. 13. Memfiat voucher pengeluaran dan penerimaan kas sesuai limit. 14. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan rapat rapat intren,RUPS, penerimaan dan penambahan pegawai,perkembangan dan kualitas portopolio perkreditan secara keseluruhan,kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan yang telah diterapkan serta dilaksanakan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	WAHYUNI S SOS	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar, keputusan rups dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Bertanggung jawab penuh untuk mengelola Bank sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan sesuai dengan prinsip GCG. 3. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional BPR dalam mencapai maksud dan tujuan BPR secara sehat. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS. 5. Menindak lanjuti temuan Audit baik eksteren maupun Interen. 6. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap pekerjaan para Petugas Bank. 7. Bekerjasama dengan direktur utama dalam melaksanakan tugas pekerjaannya untuk mencapai target sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana bisnis BPR dan anggaran yang telah disusun. 8. Memonitoring dan membina pelayanan nasabah khususnya bagian pronline agar terlayani dengan baik. 9. Bertanggung jawab atas penyimpanan saldo fisik uang dalam brankas. 10. Memfiat maksimum biaya sesuai kewenangan. 11. Bertanggung jawab dalam menangani penyelesaian pengaduan nasabah pada tingkat kedua. 12. Memeriksa transaksi keuangan setiap hari kerja sesuai nota nota pendukung. 13. Membuat dan menetapkan dan mengawasi pelaksanaan SOP dibidang kredit, operasional APU dan PTT dan lainnya. 14. Meneliti sebab sebab terjadinya kredit bermasalah dan melaporkannya ke Direktur Utama. 15. Menyetujui perhitungan keringanan denda kredit sesuai limit. 16. Sebagai petugas administrator untuk laporan ke PPATK. 17. Membina SDM dalam penerapan APU dan PTT. 18. Menganalisa, memberikan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan SOP dan SK yang dibuat Direktur Utama. 19. Menetapkan langkah langkah untuk menjalankan fungsi kepatuhan BPR dan unit kerja. 20. Memastikan bahwa BPR telah menjalankan operasionalnya sesuai ketentuan berlaku, baik kebijakan, sistem dan SOPnya tidak ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 21.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Mengenai pemberian laba Tahun 2021 terkait dampaknya pada posisi CAR masih tetap diangka Sehat sehingga dalam RUPS disetujui pemberian Dividen atas laba Tahun 2021 dengan menyisihkan untuk penambahan cadangan tujuan sebesar Rp. 200jt jdi laba yg diberikan thn buku 2021 adalah Rp. 1,5M dan untuk Laba Tahun 2020 tetap ditempatkan pada laba ditahan. 2. Terkait hasil kunjungan komisaris ke kantor cabang Muara Bungo pada bulan maret 2022 yang lalu, atas saran dan rekomendasi komisaris terkait agar dilakukan penyelesaian dan mengambil langkah langkah dan kunjungan ke kantor cabang Muara Bungo, maka direksi telah menindaklanjuti dengan mengutus audit internal dan direksi sendiri kunjungan ke kantor cabang muara bungo pada pertengahan pada tahun 2022 lalu untuk mengambil langkah dan tindak lanjut atas kredit bermasalah dan atau berpotensi bermasalah debitur di kantor cabang Muara Bungo dengan membuat laporan dan kertas kerja dan bukti kunjungan dan melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan jalur litigasi atau musyawarah mufakat. dan terlihat telah adanya debitur - debitur bermasalah dilakukan gugatan ke Pengadilan dan proses lelang KPKNL. 3. Terkait surat dari direksi pada bulan Juni 2022 mengenai permohonan rekomendasi komisaris atas permohonan kredit CV Anugrah Tiga saudara atas kredit tersebut agar dapat ditangguhkan sementara, akan tetapi dengan pertimbangan dan mitigasi risiko yg telah dibuat direksi dan mempertimbangkan untuk menaikkan obd kredit, maka direksi meyakini untuk mempertimbangkan dan memproses kredit CV Anugrah tersebut sebesar 1,5 M dan direksi telah menetapkan mitigasi dan langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Semua Rekomendasi Dewan komisaris segera ditindaklanjuti dan sudah dilaksanakan Direksi akan tetapi masih ada juga yang sedang berjalan dan dilakukan ,akan tetapi terdapat satu hal yang mana rekomendasi komisaris berseberangan dengan direksi terkait penangguhan sementara proses kredit CV Anugrah Tiga Saudara,hal tersebut dikarenakan direksi meyakini dan telah menetapkan langkah -langkah mitigasi risiko kredit CV ATS tersebut adalah : 1. agunan yang diserahkan mengcover pinjaman. 2. Sistem pembayaran RK langung dipotong pihak Bank BTN setiap akad Rp. 30jt setiap unit melalui SI dari CV ATS ke BTN.3. Pihak BPR Batanghari telah optimal dalam bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah KPR. mitigasi tersebut yang meyakinkan direksi untuk tetap memproses permohonan kredit CV ATS terutama dengan tujuan untuk menaikan obb kredit pada BPR Batanghari dan sampai saat ini kredit debitur masih masuk kategori lancar dan direksi dan manajemen akan tetap terus memantau dan menjaga kelancaran kredit CV ATS tersebut dan menetapkan langkah - langkah penyelesaiannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	D Rachmad Gultom. SE	Komisaris Utama	1. Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. 2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Dewan komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independet. 4. Dewan komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR. 5. Dewan komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan audit Internal, OJK dan atau audit Eksteren lainnya. 6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 7. Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan. 8. Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dan Pihak lain yang dapat merugikan BPR. 9. Anggota Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang membawahi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi
2	Elsye Adriany Silaen. SE	Komisaris	1. Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. 2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Dewan komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independet. 4. Dewan komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR. 5. Dewan komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan audit Internal, OJK dan atau audit Eksteren lainnya. 6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 7. Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan. 8. Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dan Pihak lain yang dapat merugikan BPR. 9. Anggota Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang membawahi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

1.Rekomendasi komisaris No. 003 tahun 2022 Berdasarkan hasil kunjungan komisaris ke kantor cabang Muara bungo pada bulan April 2022 menyarankan kepada direksi agar senantiasa memonitoring kekntr cabang khususnya dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. 2. Pendapat /saran komisaris No. 001 tahun 2022 tgl 15 Maret 2022 mengenai pemberian laba,Laba Tahun 2020 tetap ditempatkan pada laba ditahan sedangkan laba tahun 2021 dapat dibagikan sebagai deviden ,dengan catatan sebesar Rp. 150jt disisihkan untuk memperkuat pemodalan yang akan ditempatkan pada cadangan tujuan.3.Rekomendasi komisaris no. 004 tahun 2022 mengenai pendapat mengenai surat permohonan kredit CV ATS,mempertimbangkan opini direktur kepatuhan,khususnya pada poin 9 dan adanya kegagalan debitur tersebut pada proyek sebelumnya dan mendapatkan riwayat sliik kol 5 hapus buku dan riwayat macet pada Bank lain,maka untuk permohonan kredit ditangguhkan sementara.4.berdasarkan hasil kunjungan pemantauan debitur CV ATS di sarolangun pada November 2022 lalu memberikan saran /rekomendasi sebagai berikut : a. sehubungan mninggal dunia Bpk Ridwan selaku direksi (key person) dari CV ATS agar memperhatikan kembali pembaharuan pengurus CV ATS baik surat-surat izin dan jaminan atas nama Bpk Ridwan,b. Time scedule pembangunan maupun penjualan rumah sdh tidak sesuai sebagai mana yang direncanakan dalam permohonan kredit.c. dikarenakan fasilitas jangka pendek 1 thn.5 Rekomendasi komisaris terhadap penggunaan jasa KAP,agar penunjukan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan POJK KAP yang berlaku.d.meningkatkan penagihan kredit hapus buku untuk menaikkan pendapatan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris memberikan rekomendasi dalam bentuk dokumentasi tertulis dan disertai data pendukung dan direksi menanggapi dengan surat dokumen tertulis namun ada juga yang langsung action plan dan atau tindakan langsung oleh direksi yang disesuaikan menurut sifatnya saran tersebut dan melaksanakan tindakan nyata atas saran dan rekomendasi dari dewan komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	P.HASURUNGAN A MANIK SE MM	515.000.000	8,58

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	P.HASURUNGAN A MANIK SE MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	WAHYUNI S SOS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota direksi PT BPR Batanghari tidak ada hubungan keuangan dengan direksi lain, komisaris maupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	P.HASURUNGAN A MANIK SE MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	WAHYUNI S SOS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota Direksi pada PT BPR Batanghari tidak ada hubungan keluarga dengan sesama Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	D Rachmad Gultom. SE	505.000.000	8,42

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama PT BPR Batanghari yang berdomisili di Jakarta memiliki saham pada PT BPR Batanghari dengan persentase 8,42 persen dengan nominal 505 juta

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	D Rachmad Gultom. SE	PT. BPR PUSKOPAT PALEMBANG	0,06

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama PT BPR Batanghari juga memiliki saham pada PT BPR Puskopat Palembang sebesar 6 % dan juga menjabat sebagai Komisaris utama pada PT. BPR Puskopat Palembang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	D Rachmad Gultom. SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Elsye Adriany Silaen.SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris PT BPR Batanghari tidak ada hubungan keuangan baik kepada sesama komisaris,direksi maupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	D Rachmad Gultom. SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Elsye Adriany Silaen.SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris pada PT.BPR Batanghari tidak ada hubungan keluarga dengan sesama anggota komisaris,direksi,maupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	324000000	2	252000000
2	Tunjangan	2	335912891	2	45180000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		659912891		297180000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Direksi dan komisaris adalah yang telah disetujui RUPS dan merupakan pendapatan dalam 1 tahun tidak ada pendapatan lain yang diperoleh Direksi dan komisaris diluar persetujuan RUPS didalam komponen tunjangan yang diberikan rutin setiap bulan juga termasuk tunjangan yang diberikan dalam 1 tahun 1 kali yaitu tunjangan hari raya,tunjangan perumahan bagi direksi,tunjangan pakaian dinas direksi ,Untuk tunjangan PPH dan tunjangan ponsel,air dan listrik yg diberikan setiap bulan untuk direksi ,tunjangan ponsel dan air dan listrik diberikan berupa pembayaran air listrik ditanggung BPR Batanghari sesuai ketentuan dan tidak melebihi limit yang diberikan,jika melebihi limit kekurangannya dibebankan kepada Direksi.untuk komisaris tidak diberikan tunjangan perumahan maupun pakaian dinas maupun tunjangan air listrik.yang diberikan adalah tunjangan dan honor dan atau gaji pokok setiap bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	TIDAK ADA DALAM BENTUK UNIT	TIDAK ADA
2	Transportasi	TIDAK ADA	TIDAK ADA
3	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN	BPJS KESEHATAN
4	Fasilitas lainnya	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi dan komisaris PT BPR Batanghari tidak ada mendapat fasilitas dalam bentuk fisik baik rumah maupun kendaraan direksi diberikan tunjangan perumahan dan dalam bentuk uang dan untuk asuransi kesehatan direksi dan komisaris diikutsertakan dalam program BPJS kesehatan sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,85	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,06	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,31	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,23	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,04	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio Gaji untuk masing masing jabatan dan kedudukan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya di kantor PT BPR Batanghari baik antara gaji tertinggi dan terendah antara Direksi dan antara komisaris, antara pegawai, semua gaji diberikan kategori wajar dan tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan, semua gaji diberikan berdasarkan ketentuan dan persetujuan dari yang berwenang dan perbedaan gaji juga dipertimbangkan atas jabatan dan tugas dan tanggung jawab yang diemban masa kerja dan penilaian kondite.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	16-07-2022	3	Rapat Evaluasi kinerja PT BPR Batanghari semester satu tahun 2022 dan rapat pengawasan Dewan komisaris tentang evaluasi RBB semester satu tahun 2022 dengan materi rapat : 1. evaluasi kinerja keuangan PT BPR Batanghari cabang Muara Bungo .2 Action plan penyelesaian kredit bermasalah dikantor cabang muara bungo dengan poin sbr : a. untuk kredit rekening koran merupakan kredit risiko tinggi agar memperhatikan pengembalian jangka waktu kredit tersebut,membuat aturan khusus untuk perpanjangan kredit tersebut dan ketetapan penggunaan dana,b.memperhatikan pembentukan PPAP untuk kredit macet yg akan naik kolektibilitas dan memprioritaskan penyelesaian kredit bermasalah karena NPL pada kntr cabang cenderung naik.
2	29-11-2022	5	Rapat Evaluasi dewan komisaris tri wulan 3 tahun 2022 membahas dan menyoroti kinerja kantor cabang,kredit macet dan NPL untuk kantor pusat dan cabang,proses hapus buku agar tetap dilakukan sesuai SOP dan ketentuan dan menyarakan agar managenen dan bagian terkait untuk meningkatkan penagihan dan proses penyelesaian kredit bermasalah dn untuk jenis kredit Rekening koran agar benar benar dievaluasi ,tidak dilakukan adendum apabila dinilai usaha tidak berjalan dan diarahkan untuk kredit berjangka angsuran pokok bunga.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris PT BPR Batanghari melaksanakan rapat dalam tahun 2022 sebanyak 2 kali yang menjadi peserta rapat adalah dewan komsaris dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan risiko dan SKAI sebagai mana tersebut pada uraian diatas.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	D Rachmad Gultom. SE	2	0	100,00
2	Elsye Adriany Silaen.SE	2	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris PT BPR Batanghari terlaksana 2 kali selama tahun 2022 dan dikarenakan masa pandemi sudah mengangsur membaik, maka rapat dilakukan dengan tatap muka, rapat dilakukan dilaksanakan pada bulan Juli dan November 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh jenjang organisasi pada BPR Batanghari baik mulai dari RUPS, Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai PT BPR Batanghari tidak ada yang terindikasi fraud dapat terlihat dari hasil temuan baik dari audit Internal maupun eksternal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	5	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Batanghari pada dasarnya tidak ada mengalami permasalahan hukum yang akibat dari ketidakpatuhan atau kesalahan dari manajemen, permasalahan hukum yang dihadapi adalah adanya gugatan dari debitur terkait debitur yang tidak beritikab baik saat agunan akan dilakukan eksekusi lelang oleh Bank dikarenakan wanpretasi. debitur yang tidak beritikab baik dengan kredit kolektibilitas macet langsung mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan dengan maksud untuk menghalang halangi atau menunda proses eksekusi agunan dan untuk perkara hukum lainnya semua seputar kredit macet yaitu debitur wanprestasi, lalu bank mengajukan gugatan sederhana pada Pengadilan untuk penyelesaian kredit macet / bermasalah melalui jalur litigasi atau jalur hukum, jadi ke 5 perkara yang telah selesai dalam hal telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu adalah berupa gugatan sederhana yang diajukan pihak Bank atas kredit macet debitur PT BPR Batanghari dan untuk perkara yang belum incrah nihil.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada BPR Batanghari Mengalami benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama Tahun 2022 BPR Batanghari tidak ada memberikan sumbangan baik sosial maupun politik

Nama BPR	: PT. BPR Batanghari
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Jl Slamet Riyadi No 5A Broni Jambi
Nomor Telepon	: 741671232
Modal Inti BPR	: 11.429.641.000,00
Total Aset BPR	: 53.029.261.321,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,3
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan GCG PT. BPR Batanghari Tahun 2022 mendapatkan hasil dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 1,33 terlihat dari 11 faktor tata kelola yang telah diterapkan PT.BPR Batanghari dengan predikat setiap faktor adalah baik,faktor 1. Tugas dan tanggung jawab direksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan,2.Tugas dan tanggung jawab Komisaris telah dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan sebagai fungsi pengawasan , Faktor 3. Tugas pelaksanaan fungsi komite pada BPR batanghari tidak membentuk komite karena modal inti masih di bawah 50 M,Faktor 4. Benturan kepentingan BPR Batanghari belum pernah terjadi benturan kepentingan,BPR Batanghari mampu menghindari Transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan,faktor 5 , faktor 6 dan faktor 7 Penerapan fungsi kepatuhan,dan Audit Interen dan eksteran,BPR batanghari telah melaksanakan fungsi kepatuhan setiap unit kerja telah menerapkan budaya patuh pada setiap unit kerja sesuai pada ketentuan yang berlaku baik terhadap ketentuan dan kebijakannya,untuk Audit Interen telah melaksanakan fungsinya dan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan audit membuat rencana kerja,dan dari hasil kerja audit internal belum pernah ada ditemukan fraud pada BPR Batanghari, Audit eksteren telah di laksanakan oleh BPR Batanghari dengan menjalin kerjasama dengan KAP yang telah terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan BPR secara Transparan,untuk faktor 8 dan faktor 9 ,BPR Batanghari telah menerapkan manajemen risiko, memiliki kebijakan,prosedur dan limit risiko walau masih ada sebahagian kecil limit risiko yang belum di ditetapkan akan tetapi kedepannya akan ditetapkan limit risiko lainnya ,setiap unit kerja telah mengetahui dan telah memiliki budaya sadar risiko pekerjaanya, jadi manajemen risikio telah diterapkan oleh masing masing unit kerja sehigga risiko dapat diminimalisir ,dan pengendalian intern berjlan dg baik,sehingga tujuan tata kelola berjln baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,55	0,14	1,19	0.238	Pada Faktor satu yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi mendapat nilai baik karena direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan bertanggung jawab dan melaksanakan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lainnya, dan Direksi tidak ada yang mengambil keuntungan pribadi dari BPR dan semua fasilitas gaji yang diterima direksi sesuai ketentuan dan persetujuan RUPS dan komisaris
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,75	0,20	1,62	0.243	Pada faktor dua mendapat nilai baik, karena komisaris telah menjalankan fungsinya dengan dengan tanggung jawab sesuai kewenangannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan OJK sebagai fungsi pengawasan dan memberikan saran dan masukan dan rekomendasi kepada direksi untuk kemajuan BPR Batanghari
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak memiliki komite karena modal inti kurang dari 50 Milyar
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	Pada Faktor ini mendapat predikat sangat baik karena BPR Batanghari belum pernah terjadi benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,80	0,20	1,90	0.190	Pada Faktor lima Penerapan Fungsi kepatuhan mendapat predikat sangat baik karena budaya patuh telah dilaksanakan di BPR Batanghari dan semua kegiatan usaha BPR dilaksanakan sesuai ketentuan OJK dan ketentuan lain yang terkait

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,60	0,13	1,43	0.143	Pada Faktor enam yaitu penerapan fungsi audit intern mendapat predikat sangat baik, karena BPR Batanghari telah menunjuk PE Audit internal dan telah melaksanakan fungsi audit internal di BPR dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah sesuai standar Audit internal yg telah ditentukan OJK dan tidak ada temuan dari BPR Batanghari ada nya Fraud atau temuan penyimpangan yang signifikan apalagi merugikan BPR
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Pada Faktor tujuh BPR Batanghari mendapat predikat sangat baik, karena BPR telah menggunakan jasa audit eksternal yaitu KAP untuk mengaudit laporan keuangan BPR Batanghari yang KAP tersebut telah terdaftar di OJK dan prosedur penunjukan KAP dan Mou dan tata cara telah sesuai dengan ketentuan OJK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,67	0,80	0,10	1,57	0.157	Pada Faktor delapan mendapat predikat sangat baik, karena BPR Batanghari telah menerapkan manajemen risiko pada setiap unit kerja dan pengendalian intern untuk memitigasi risiko dan meminimalis risiko dan setiap unit kerja sudah paham dan sadar risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	Pada Faktor sembilan BPR Batanghari mendapat predikat sangat baik karena BPR Batanghari telah menetapkan kebijakan dan ketentuan mengenai BMPK dan tidak terjadi pelanggaran BMPK dan laporan BMPK disampaikan ke OJK sesuai ketentuan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Pada Faktor sepuluh Rencana Bisnis BPR Batanghari telah disusun direksi dan disampaikan ke RUPS untuk dimintakan persetujuan dan dilaporkan ke OJK dalam rencana bisnis memaparkgaran dan strategi yang sesuai dengan visi misi BPR Batanghari

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Pada Faktor sebelas BPR Batanghari mendapat predikat sangat baik karena BPR Batanghari telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dipublikasikan ke masyarakat untuk dapat diketahui kondisi keuangan dan kesehatan Bank BPR Batanghari dan tata cara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK
Nilai Komposit						1.3	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PT BPR Batanghari memiliki 2 Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur yang merangkap Direktur Kepatuhan, jadi PT BPR Batanghari telah melaksanakan ketentuan Tata kelola untuk indikator jumlah direksi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Ya, 2 orang Direksi PT BPR Batanghari tinggal dan berdomisili di Kota yang sama yaitu Kota Jambi
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak, 2 orang Direksi PT BPR Batanghari tidak ada merangkap jabatan pada Bank lain, Non Bank atau pun Partai Politik
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Ya, 2 orang Direksi dan atau mayoritas Anggota Direksi PT BPR Batanghari tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama Direksi dan atau sesama anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Ya, Direksi PT BPR Batanghari tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau penyedia jasa Profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Ya, Seluruh anggota Direksi PT BPR Batanghari telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Ya, Direksi PT BPR Batanghari melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Ya, Direksi PT BPR Batanghari menindaklanjuti temuan audit, baik audit interen, audit eksteren dan Otoritas jasa keuangan dan atau otoritas lainnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Ya, Direksi PT BPR Batanghari menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Ya, pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan suara terbanyak
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Ya, Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Ya, Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam peningkatan kemampuan SDM tentang Bank dan Bidang keuangan dengan cara memberikan dan mengikuti setiap jenjang organisasi dalam pendidikan dan pelatihan secara konsisten
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Ya, Direksi mampu mengimplementasikan kompeten yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan terus belajar untuk memahami ketentuan terbaru
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Ya, Direksi telah melaksanakan pedoman tata tertib kerja, rapat dan telah tertuang dalam pedoman kebijakan dan prosedur Tata kelola
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Ya Direksi bertanggung jawab mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Ya, Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan strategis bpr dibidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Ya, dalam setiap rapat dengan direksi dan hasil rapat dituangkan dalam notulen ataupun risalah rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan terhadap pegawai akan tetapi belum seluruh pegawai dan atau belum maksimal dan untuk peningkatan pengetahuan Direksi telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai untuk menambah pengetahuan pegawai secara konsisten dan untuk pencapaian sudah mencapai target yang ditetapkan, walau belum semua target sesuai dengan yang diharapkan dan atau ekspektasi Stakeholder
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Ya, Direksi BPR menyampaikan laporan Tata kelola BPR setiap tahunnya kepada OJK, asosiasi BPR dan atau majalah ekonomi sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Ya, Jumlah anggota Dewan komisaris BPR Batanghari berjumlah 2 orang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris sesuai ketentuan terhadap modal inti kurang dari 50 Milyar
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Ya, jumlah anggota komisaris BPR Batanghari tidak melampaui jumlah anggota direksi BPR Batanghari
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Ya, seluruh anggota Dewan komisaris BPR Batanghari telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS dan perpanjangan masa jabatan dilakukan RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Ya, 1 orang komisaris BPR Batanghari berdomisili sama dengan kedudukan kantor pusat PT BPR Batanghari yaitu Kota Jambi
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Batanghari tidak memiliki komisaris independen karena modal inti kurang dari 50 Milyar
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Ya, sesuai dengan pedoman Tata kelola PT BPR Batanghari, komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja, dan aturan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Ya, Komisaris PT BPR tidak merangkap jabatan jabatan lebih dari 2 BPR sesuai dengan pedoman Tata kelola BPR Batanghari
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Ya, Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Ya, Tidak ada komisaris Independen karena Modal Inti kurang dari 50 Milyar
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Ya, sudah dilaksanakan dan dituangkan dalam Notulen rapat dan hasil rekomendasi komisaris dan evaluasi RBB
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Ya, Komisaris telah menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Ya, Dewan Komisaris BPR Batanghari tidak terlibat dalam pengambilan putusan kegiatan operasional kecuali yang diperbolehkan peraturan perundangan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Ya, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Ya, komisaris telah menyediakan cukup waktu untuk menjalankan tugasnya selama Tahun 2021 komisaris telah melaksanakan rapat selama 4 kali selama tahun 2021 dan telah memenuhi ketentuan rapat minimal 3 bulan 1 kali atau setahun sebanyak 4 kali

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Ya telah dilaksanakan dan disampaikan dalam notulen rapat Komisaris dan rekomendasi komisaris
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Ya, Dewan Komisaris tidak mengambil keuntungan pribadi dari BPR Batanghari
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Ya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Ya, hasil Rapat komisaris PT. BPR Batanghari selalu dituangkan dalam bentuk Notulen rapat komisaris dan didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	Ya, BPR Batanghari telah memiliki Standar Operasional Prosedur Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Pada PT BPR Batanghari belum pernah terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BPR Batanghari
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Pada PT BPR Batanghari belum pernah terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan BPR Batanghari
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Ya, BPR Batanghari termasuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari 50 M dan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Ya, Direksi PT BPR Batanghari yang membawahi fungsi kepatuhan memahami aturan ketentuan mengenai perbankan, akan tetapi akan terus belajar untuk ketentuan yang baru
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	ya, BPR batanghari telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalani fungsi kepatuhan, dan pejabat tersebut independen terhadap satuan kerja dan fungsi operasional
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Ya, sudah dilaksanakan menyusun SOP kepatuhan, akan tetapi akan masih terus belajar
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Ya, BPR Batanghari telah memiliki SOP kepatuhan dan tugas dan tanggung jawab dituangkan dalam Job Description
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Ya, Direksi yang membawahi kepatuhan telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan wewenangnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Ya, Anggota direksi yang membawahi kepatuhan telah melakukan tercipta budaya patuh dan setiap unit kerja telah semakin meningkat untuk budaya patuhnya dengan melaporkan kewajiban laporan tepat waktu dan menjalankan operasional bpr sesuai ketentuan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Ya, Setiap pelaksanaan keputusan, kebijakan & semua kegiatan operasional BPR Batanghari dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	ya sudah dilaksanakan, BPR Batanghari dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Ya, telah dilaksanakan fungsi kepatuhan melakukan revidi atas SOP dan membuat rekomendasi akan tetapi masih terus ditingkatkan dan belajar
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Ya, BPR Batanghari menyesuaikan setiap aturan dan kebijakan dan kegiatan usaha bpr sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Ya, Anggota direksi yang membawahi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pokoknya kepada direksi dan komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	kebijakan dan aturan BPR Batanghari belum pernah ada yang menyimpang dari aturan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Ya, BPR Batanghari telah memiliki Pejabat Eksekutif yang Audit Internal dan satu orang stafnya
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Ya, telah memiliki kebijakan dan prosedur SKAI sesuai ketentuan yang berlaku
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Ya, PE Audit Internal atau SKAI PT. BPR Batanghari tidak terlibat dalam operasional BPR Batanghari
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Ya, PE Audit Internal PT BPR Batanghari bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Ya, telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Rencana kerja Tahunan PT BPR Batanghari
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Ya, Penerapan Audit Internal BPR Batanghari telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan SOP

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Batanghari tidak menerapkan kaji ulang untuk pihak ekstern terhadap kepatuhan terhadap standart Audit Interen karena memiliki modal Inti kurang dari 50 Milyar
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Ya telah dilaksanakan prosedur Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan SOP
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	ya,bpr melaksanakan peningkatan mutu sdm dibagian audit untuk meningkatkan pengetahuan dan skil dengan mengikutkan pada pelatihan - pelatihan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Ya telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya,Laporan pokok pokok tugas Audit Internal telah dilaporkan setiap tahunnya kepada OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Batanghari tidak ada kewajiban untuk melaporkan hasil kaji ulang dari pihak ekstern karena modal inti BPR Batanghari kurang dari 50 Milyar

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Ya, setiap pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Ya, BPR Batanghari menggunakan jasa Akuntan Publik untuk mengaudit laporan Tahunan PT BPR Batanghari dan dilaksanakan dengan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Ya, dalam penunjukan akuntan publik BPR Batanghari meminta persetujuan RUPS dan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya telah dilaksanakan dan dilaporkan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Ya, telah dilaksanakan dan dilaporkan tepat waktu dan hasil pemeriksaan tergambar permasalahan BPR dan Laporan keuangan BPR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, cakupan Audit PT BPR Batanghari sesuai dengan ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Ya,BPR Batanghari telah menunjuk pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko untuk modal inti dibawah 50 Milyar
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	Ya,BPR Batanghari telah memiliki kebijakan manajemen risiko,prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Ya,BPR Batanghari telah memiliki kebijakan dan prosedur aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Ya,Direksi PT BPR Batanghari menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara tertulis dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Ya,telah dilaksanakan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko,dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Ya, BPR Batanghari menerapkan manajemen risiko bagi setiap aktivitas dan kegiatan usaha BPR,dan budaya sadar risiko sudah diterapkan oleh masing masing unit krja dan pegawai
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Ya,BPR Batanghari menerapkan sistem pengendalian intern
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya ,BPR Batanghari telah menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Ya,BPR Batanghari telah memiliki sistem informasi manajemen, akan tetapi masih perlu penyempurnaan agar lebih cepat update lagi dan semakin lengkap
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Ya,BPR Batanghari telah mengembangkan budaya manajemen risiko kepada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya,BPR batanghari melaporkan propil risiko BPR Ke OJK sesuai ketentuan OJK dan untuk propil risiko lain belum pernah terjadi di BPR Batanghari
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya,BPR Batanghari telah membuat aturan pelaksanaannya dan ada pengembangan produk dasar baru pada akhir tahun 2022 berupa uang digital BPR Ecash dan telah dilaporkan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Ya,BPR Batanghari telah memiliki kebijakan dan sistem prosedur tertulis mengenai BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Ya,Prosedur BMPK BPR Batanghari disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan OJK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Ya,proses pemberian kredit kepada pihak terkait BPR telah disesuaikan dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya,BPR Batanghari telah melaporkan pemberian kredit kepada Pihak terkait sesuai ketentuan OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya,BPR Batanghari belum pernah melanggar dan atau melampaui Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sesuai ketentuan OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Ya,Rencana Bisnis BPR Batanghari telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR Batanghari
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya,Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana srategi jangka panjang dan rencana bisnis Tahunan,penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dan cakupan sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Ya,Rencana bisnis yang telah dibuat oleh Direksi telah disetujui dan didukung oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Ya,Rencana Bisnis BPR Batanghari disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal,internal prinsip kehati - hatian dan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Ya, Komisaris PT BPR Batanghari melakukan pengawasan terhadap rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya,Rencana Bisnis BPR Batanghari termasuk perubahan rencana bisnis BPR disampaikan ke OJK sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Ya, BPR Batanghari memiliki sistem Pelaporan Keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem yang menghasilkan laporan yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, BPR Batanghari membuat laporan Publikasi setiap tri wulan sesuai ketentuan OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, BPR Batanghari membuat laporan keuangan Tahunan sesuai ketentuan OJK, paling sedikit memuat informasi umum mengenai laporan keuangan, opini akuntan publik
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, BPR Batanghari telah melaksanakan transparansi informasi produk, layana dan atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, BPR Batanghari menyusun laporan Tahunan sesuai ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Ya, BPR Batanghari dalam menyusun dan melaporkan keuangan publikasi ditandatangani oleh 2 orang direksi dan tata cara publikasi sesuai ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Ya, BPR Batanghari telah melaksanakan pengaduan nasabah dan laporannya rutin disampaikan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

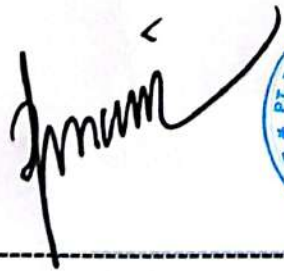
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

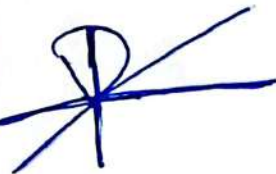
LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BATANGHARI
TAHUN 2022

Jambi, 10 JANUARI 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Direktur Utama



Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Batanghari Jambi
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 5A Broni Jambi
No Telp : 0741 – 671232
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Modal Inti : Rp. 11.429641.000,-
Total Aset : Rp. 53.029.261.321,-
Status Audit : Di Audit Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng
Bobot BPR : Bobot B
Nilai Komposit : 1.33
Peringkat Komposit : Sangat Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Batanghari Jambi periode 31 Desember 2022 sampaikan sebagai berikut :

- A. Nilai Komposisi Tata Kelola sebesar 1,33 dengan predikat Sangat Baik
- B. Dengan peringkat masing – masing faktor yang dinilai adalah sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan bobot 20,00% dengan peringkat 1,19 dengan total nilai 0,238.
 2. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan bobot 15.00% dengan peringkat 1,62 dengan total nilai 0,243.
 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas komite dengan bobot 0,00%,peringkat 0,00% dan nilai 0,00 diberikan nilai 0 karena BPR Batanghari tidak menerapkan fungsi komite karena sesuai dengan ketentuan OJK bahwa modal inti kurang dari 50 M tidak wajib membentuk komite independent dan nilai tetap dianggap “BAIK” sebagai mana telah diatur dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
 4. Penanganan benturan kepentingan dengan bobot 10,00%, dengan peringkat 1,00% dengan total nilai 0,100.
 5. Penerapan tugas fungsi kepatuhan dengan bobot 10,00% dengan peringkat 1,90 dengan total nilai 0,190.
 6. Penerapan Fungsi tugas Audit Interen dengan bobot 10,00% dengan peringkat 1,43 dengan total nilai 0,143.
 7. Penerapan fungsi Audit Eksteren dengan bobot 2,50% dengan peringkat 1,00 dengan total nilai 0,025.
 8. Penerapan Managemen risiko dan sistem pengendalian interen 10,00% dengan peringkat 1,57 dengan total nilai 0,157.
 9. Batas Maksimum pemberian kredit dengan bobot 7,50% dengan peringkat 1,20 dengan total nilai 0,090.
 10. Rencana Bisnis BPR dengan bobot 7,50% dengan peringkat 1,00 dengan total nilai 0,075.
 11. Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan serta pelaporan Internal dengan bobot 7,50% dengan peringkat 1,00 dengan total nilai 0,075.



Jadi berdasarkan hasil semua penjumlahan nilai diatas dan dikalikan bobot maka didapatkan nilai komposit penilaian Tata Kelola atau Gcg PT. BPR Batanghari untuk Tahun 2022 adalah sebesar 1,33 dengan peringkat komposit "Sangat Baik"

Berikut Tabel Predikat Komposit

<i>Nilai Komposit</i>	<i>Predikat Komposit</i>
1,0 Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

C. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola (Gcg)

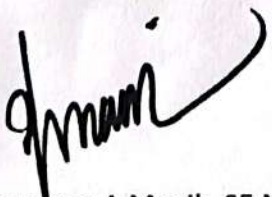
- Dengan disusunnya SOP Tata Kelola (GCG) PT. BPR Batanghari ,Tata kelola akan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Susunan Struktur Organisasi PT. BPR Batanghari semua dapat terpenuhi sesuai ketentuan aturan Tata Kelola BPR.
- Kegiatan Usaha BPR dapat dilaksanakan oleh organ yang cukup sehingga kegiatan usaha BPR dapat berjalan dengan baik dan sehat sesuai dengan bidang kerja masing –masing.
- Dewan komisaris , Direksi dan seluruh jenjang organisasi mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya semua dilaksanakan dengan efektif dan penuh tanggung jawab. sehingga tidak berdampak negatif terhadap BPR Batanghari dan Para Stakeholder.
- Fungsi Kepatuhan, fungsi Audit internal dan fungsi Audit Ekstren melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Tata Kelola BPR.

Demikian laporan Pelaksanaan Tata kelola (Gcg) PT. BPR Batanghari ini kami sampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Batanghari dalam wujud Tata Kelola yang baik.

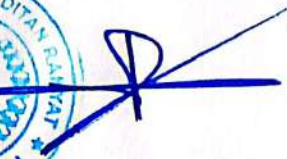
Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Batanghari.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas dukungannya selama ini kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 10 Januari 2023


P. Harungan.A. Manik .SE.MM
Direktur Utama




D. Rachmad Gultom.SE
Komisaris Utama